



PENANGGUNG JAWAB
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI
A. Bagus Laksana, SJ

KOORDINATOR
Yulius Suroso, SJ

REDAKSI
M. Dam Febrianto, SJ
Harry Kristanto, SJ

ARTISTIK
Willy Putranta
Slamet Riyadi

KEUANGAN
Ani Ratna Sari
Francisca Triharyani

IKLAN
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI
Anang Pramuriyanto
Maria Dwi Jayanti

PEMBAYARAN
Rp 20.000 (JAWA)
Rp 22.000 (LUAR JAWA)

BCA Jl. Jend. Sudirman, Yogyakarta,
a.n. Sindhunata **No. 037.0285.110**

BNI 46 Cab. Yogyakarta,
a.n. Bpk Sindhunata **No. 1952000512**

HUBUNGI KAMI!

Redaksi:
rohanimajalah@gmail.com
Administrasi/distribusi:
rohani.adisi@gmail.com

Jl. Pringgokusuman
No. 35, Yogyakarta 55272
0274.546811, 081802765006
0274.546811

DAFTAR ISI

KATA REDAKSI

1 | Satu dalam Solidaritas

A. Bagus Laksana, SJ

SAJIAN UTAMA

5 | Ber-Teologi Publik

Paulus Bambang Irawan, SJ

11 | Cinta Tanah Air sebagai Titik Temu

Ahmad Shalahuddin Mansur

17 | Liyan Kultural dan Gereja Multikultural

Mutiara Andalas, SJ

OLEH-OLEH REFLEKSI

22 | Melayani di Tengah Kesibukan
Kristhalia Dessindi

BAGI RASA

26 | Dihibur dengan Menghibur
Amadea Prajna Putra M., SJ

SABDA YANG HIDUP

29 | Cerdik Beradu Siasat
Bernadus Dirgaprimawan, SJ

KAUL BIARA

34 | Jati Diri Seorang Bruder Religius
Paul Suparno, SJ

FOTO COVER:

Agus Leonardus

LEMBAR PASTOR

40 | Terlibat dalam Peristiwa Indonesia
B.S. Mardiatmadja, SJ

RUANG DOA

45 | Spiritualitas Maria Hamba Allah
M. Rita, AK

BELAJAR TEOLOGI

49 | Teologi Publik: Apa dan Bagaimana?
Martinus Dam Febrianto, SJ

SENI DAN RELIGIOTAS

54 | Perjuangan Karkati
Ignatia Esti Sumarah

REMAH-REMAH

59 | Jangan Menunda
Gisela, OP

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter dengan spasi (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi September 2020 adalah "Gaya Hidup Sehat Religius" dan Oktober 2020 adalah "Pengelolaan Personalia Gereja". Tenggat waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

Ber-Teologi Publik

Dalam pertemuan tahunan The Society of Christian Ethics tahun 2013, Stanley Hauerwas, seorang ahli etika Kristiani terkemuka di Amerika Utara, membuat tanggapan atas presentasi bertema perkembangan dan masa depan teologi publik di Amerika Utara dengan sebuah pertanyaan singkat, “Pernahkah teologi tidak berciri publik?”

PAULUS BAMBANG IRAWAN, SJ | Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma

MENURUT Hauerwas, teologi hadir dalam “perjumpaan”. Karena hadir dalam perjumpaan itulah, maka teologi tidak pernah menjadi suatu *soliloqui*. Kekayaan pengalaman perjumpaan tersebut menjadi titik berangkat proses pemaknaan. Seorang teolog bahkan bukan hanya perlu melihat perjumpaan spesifik yang dihadapi waktu itu, tetapi juga terbuka untuk belajar dari aneka perjumpaan sepanjang sejarah untuk menjawab persoalan yang kurang lebih sama. Tradisi adalah semacam rekam jejak aneka perjumpaan. Intinya: *logos* itu tinggal di antara kita, yang semakin plural ini.

Intervensi Hauerwas menunjukkan bahwa duduk permasalahan dari “teologi publik” bukan lagi soal berkuat menjawab pertanyaan “apakah” teologi berciri publik atau privat tetapi “bagaimana yang publik” menantang seorang teolog untuk mengkonstruksi ulang

teologinya. Teologi memang mudah jatuh pada pendekatan yang berciri deduktif. Gampangnya, dimulai dari premis-premis tak terbantahkan tentang kebenaran dan kemudian mencari aplikasinya untuk hidup bersama. Teologi publik membalik pendekatan deduktif semacam ini. Teologi publik dimulai dari perjumpaan, perjumpaan dengan publik yang gelisah memikirkan perkara bersama yang dihadapi. Di hadapan perjumpaan tersebut, klaim-klaim kebenaran yang didaku ditantang untuk dipahami dan diterima secara publik pula.

Teologi Publik yang Terus Bergerak

Teologi publik sebagai sebuah *style* berteologi memang cukup kuat berkembang di daratan Amerika Utara. Kekhasan konteks Amerika memberi dorongan bagi berkembangnya teologi publik. Dokumen *The Bill of Rights*

tahun 1791 salah satunya berisi amandemen pertama dari Konstitusi Amerika. Disebutkan dalam amandemen tersebut larangan untuk membentuk negara agama, namun sekaligus jaminan kebebasan untuk beragama. Maksud amandemen ini yang terus diperdebatkan sampai saat ini. Di satu sisi, sebagian kalangan menganggap bahwa karena negara tidak mensponsori agama, maka ruang lingkup agama hanyalah di wilayah privat setiap individu. Agama semestinya tidak mencampuri urusan publik. Akan tetapi, penafsiran lain, yang lebih diterima oleh umum, justru menekankan keterbatasan negara untuk intervensi pada dinamika keagamaan selama dinamika tersebut tidak mengganggu keteraturan publik. Penafsiran pertama menekankan keterbatasan agama, sedangkan penafsiran kedua menekankan kemerdekaan dari intervensi pemerintah terhadap aktivitas keagamaan.

Konteks khusus ini memberikan warna tersendiri pada teologi publik *à la* Amerika Utara yang boleh dikatakan berbeda dengan Teologi Pembebasan di Amerika Latin atau Teologi Politik *à la* Johann Baptist Metz. Para pemikir generasi perdana teologi publik sangat peka terhadap keterpisahan antara “yang privat” dan “yang publik”, serta bagaimana agama mesti menempatkan diri. Beberapa tokoh yang layak disebut misalnya Reinhold Niebuhr dan John Courtney Murray. Mereka mencoba

untuk mengurai keruwetan dialektika dua ruang ini.

Niebuhr yang sangat Agustinian agak hati-hati ketika bicara tentang “yang publik” terutama terkait moralitas. Orang bisa baik di ranah privat, tetapi ketika berkumpul di dalam “ruang publik” sangat mudah terjatuh dalam godaan untuk mendominasi, khas “kecurigaan Agustinian”. Maka dari itu, realisme politik adalah sesuatu yang harus diterima. Politik bukan ruang berkumpulnya orang-orang suci, tetapi ruang negosiasi kepentingan. Sementara itu, Murray yang dipengaruhi tradisi skolastik justru melihat “yang kudus” hadir dalam karut-marutnya membangun “yang publik”, khas “optimisme Thomistik”. Dua pemikir ini seakan menampilkan dua sisi berbeda tentang bagaimana agama mesti tampil di ranah publik. Yang satu menekankan fungsi kontrol atau kritik kenabian dari agama. Yang lain menekankan sisi harapan untuk berjalan bersama membangun komunitas tak sempurna ini menuju persekutuan ilahi, pun kalau realisasinya baru nanti di akhir zaman.

Generasi kedua teologi publik memiliki minat yang lebih luas lagi. Memasuki tahun 1980, perhatian diberikan pada fakta pluralitas. Salib tidak lagi menjadi satu-satunya simbol religius di ruang publik yang sebelumnya “sangat berwarna Kristen” tersebut. Lebih dari itu, mulai muncul komunitas-komunitas agama lain, terutama karena pengaruh globalisasi. Bagaimana



Harry Setianto Sunaryo, SJ

Ardi

kita memahami kekristenan di masyarakat yang plural ini?

Beberapa meratapi memudarnya *Christendom*, yakni mundurnya pengaruh kekristenan secara politik dan sosial. Ratapan ini diikuti dengan usaha untuk menampilkan kembali kekristenan sebagai komunitas alternatif yang bisa “menyelamatkan” komunitas politik dari kehancuran. Akan tetapi, ada pula pendekatan lain yang lebih positif. Terhadap kegundahan untuk menempatkan diri di ruang publik yang baru ini, Ronald Thiemann mengajak

komunitas Kristiani untuk melihat kembali narasi dan ritual Kristiani abad perdana yang tumbuh berkembang dalam semangat keterbukaan terhadap budaya-budaya baru. Dunia Perjanjian Baru menampilkan perjumpaan budaya yang saling memperkaya antara tradisi Yahudi dan Yunani. Narasi dan ritual ini justru bisa menjadi dasar bagi pembentukan etika publik yang merangkul semua.

Dalam generasi kedua ini juga pantas disebut kontribusi David Tracy yang menawarkan imajinasi analogis

(*analogical imagination*) di dalam pencarian teologi publik. Publik dimaknai sebagai tiga ruang (*sphere*) yang saling berkelindan, yakni Gereja, masyarakat, dan dunia akademik. Maka dari itu, setiap klaim teologi perlu dipertanggungjawabkan di dalam tiga ruang ini dan di dalam ruang kerjanya masing-masing. Peran imajinasi analogis adalah membiarkan “yang klasik” (entah teks, ritus, peristiwa, maupun tokoh) berbicara dan membuka imajinasi kreatif baru bagi manusia saat ini yang bergulat dengan masalah mereka yang khas.

Generasi ketiga teologi publik lebih menitikberatkan pada bagaimana *res publica* (perkara-perkara publik) menjadi titik pijak bagi proses berteologi sekaligus kriteria *praxis* baru yang semestinya dihasilkan darinya. Teolog pada generasi ini tidak lagi tertarik untuk mendalami perdebatan tentang privatisasi agama atau usaha mencari jembatan antara “yang kudus” dan “yang sekuler”. Perhatian utama mereka bukanlah untuk menjawab pertanyaan “apakah” agama mendapat tempat di ruang publik, tetapi “bagaimana” agama berperan dan terlibat di dalamnya.

Yang menarik dari generasi ketiga ini adalah secara metodologis, mereka terbuka pada kontribusi ilmu-ilmu lain, misalnya pendekatan politik-ekonomi, kebijakan publik, kritik sastra. Cara kerja mereka menjadi multidisiplin. *Insights* yang ditawarkan oleh pendekatan

multidisiplin menjadi titik berangkat untuk berdialog dengan kekayaan tradisi yang terbentang sejak komunitas jemaat perdana sampai saat ini. Sebagai contoh, Kevin Ahern menulis tentang peran LSM Kristiani di dalam masyarakat plural yang berfungsi untuk menstrukturkan operasionalisasi rahmat (*the structure of grace*). Katie Grimes menulis tentang sakramen, terutama ekaristi, sebagai ruang pengakuan sekaligus ruang rekonsiliasi bagi masyarakat yang terpecah-pecah karena rasisme. Ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di awal periode kedua Barack Obama yang mempertanyakan efek destruktif campur tangan para oligark ekonomi dalam pengambilan kebijakan publik, Kwok Pui-Lan membawa pendekatan pascakolonial terutama analisis tentang “rakyat” (*the people*) yang, walaupun berada di periferi, akan selalu menegosiasi diri di hadapan yang berkelimpahan (*the haves*).

Keterbukaan teologi terhadap pendekatan-pendekatan ilmu lain bukannya tanpa tantangan. John Milbank, misalnya, mempertanyakan ketidakpercayaan teologi untuk bicara di ruang publik sehingga perlu “meminjam” pendekatan sekuler. Milbank khawatir kekhasan narasi Kristiani menjadi hilang atau tidak sambung dengan pendekatan sekuler. Sebagai contoh, rasionalitas sekuler liberal berkembang dari zaman modern dan dilahirkan lewat “ontologi kekerasan”, padahal ontologi Kristianitas adalah cinta dan

kerajaan damai. Menerima begitu saja rasionalitas sekuler berarti menafikan perbedaan fundamental ini.

Tentu pendapat Milbank ini juga mendapat tanggapan yang sepadan dari para teolog publik. Bukankah yang sering dikatakan sebagai “kekhasan” pendekatan Kristiani juga lahir dari perjumpaan Kristianitas dengan aneka budaya sepanjang sejarah? Seperti halnya Kristianitas berakar pada perjumpaan kebudayaan Yahudi dan Yunani, teolog publik ingin melanjutkan serta membuka ruang-ruang perjumpaan tersebut, terlebih dengan masyarakat plural yang dihadapi oleh sang teolog, entah di Amerika Utara, India, ataupun Indonesia. *Passion* untuk memulai pencarian teologi dari *res publica* itulah *drive* utama teologi publik. Maka dari itu, tidak berlebihan seandainya John Gruchy, editor *International Journal of Public Theology*, mendefinisikan teologi publik sebagai “melibatkan diri pada dunia sekuler dengan keruwetan permasalahannya dan pada saat yang sama menyelami tradisi Kristiani untuk menemukan sumber inspirasi untuk menghadapinya”. Kalau Milbank mewanti-wanti akan perbedaan, teologi publik justru ingin mencari titik temu antara “yang kudus” dan “yang sekuler”.

Teologi yang Menjumpai Publik Indonesia

Secara metodologis dan sejarah perkembangannya, konteks sang pelaku teologi menentukan arah

sekaligus warna teologi publik yang diusungnya. Untuk Indonesia, sudah ada beberapa usaha ber-teologi publik dengan membawa konteks khas ke-Indonesia-an. Pancasila mendapat perhatian yang utama. Eka Darmaputera menelaah Pancasila dari sejarah pembentukan budaya nusantara yang secara inheren berciri plural. Lewat pembacaan atas sejarah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Jawa dan penelitian atas pidato-pidato Presiden Soekarno di masa persiapan kemerdekaan, ia melihat bahwa Pancasila memberikan ruang bagi terjadinya dialektika yang sehat antara kebhinekaan dan persatuan. Benyamin Intan menganalisis Pancasila dari sudut pandang etika sosial. Yang membedakan dengan Eka Dharmaputra, Intan menjadikan Islam sebagai partner dalam berdialog untuk menemukan formula yang tepat bagi peran publik agama. Walaupun agama memang berpotensi menimbulkan konflik dan rawan politisasi, tetapi “substansi” dari kepercayaan dan laku keagamaan di Indonesia, dalam hal ini Islam dan Kristianitas, memberi ruang bagi terbentuknya masyarakat yang toleran dan menghargai demokrasi.

Beberapa tema lain yang menjadi perhatian pendekatan teologi publik Indonesia (meskipun mereka tidak *per se* menyebut pendekatan mereka teologi publik) adalah tentang konflik dan rekonsiliasi. Dimulai dari tema pencarian kebenaran dan rekonsiliasi atas tragedi pasca-1965 sampai

dengan konflik-konflik kesukuan pascareformasi. Kiercerberger menulis keterkaitan Gereja Katolik dengan tragedi '65. Antonius Sumarwan lewat pendekatan naratif mencoba memberi ruang ratapan para korban tragedi '65 yang seakan-akan sedang "menyeberangi sungai air mata". Selain itu, ada pendekatan menarik yang ditawarkan oleh Septemi Lakawa. Ia mencoba mengelaborasi konsep rekonsiliasi yang muncul karena ketegangan antara "hospitalitas" dan pengalaman "luka" karena konflik.

Masih ada beberapa tema lain yang muncul dari konteks khas pelaku teologi. Beberapa teolog dari Indonesia Timur getol menulis tentang pengaruh kapitalisme ekstraktif terhadap kerusakan lingkungan terutama lewat pertambangan. Terkait dengan hal tersebut, muncul juga perhatian akan etika bisnis (terutama dalam keluarga Tionghoa Indonesia) dalam kaitannya dengan teologi Calvin. Walaupun tidak cukup mayor, isu-isu kesetaraan gender juga mulai muncul di dalam khasanah teologi publik Indonesia.

Menurut penulis, tema yang menarik dan sangat relevan dengan konteks Indonesia akhir-akhir ini adalah mengecilnya peran Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua kelompok. Menariknya, inisiator gagasan ini adalah dua Kardinal yang kita miliki, yaitu tulisan Kardinal Ignatius Suharyo tentang "The Catholic Way" dan tulisan Kardinal Julius

Darmaatmadja tentang "Panggilan Umat Kristiani Membangun NKRI". Tulisan Kardinal Darmaatmadja lebih bergaya permenungan personal tentang panggilan umat Kristiani untuk melibatkan diri dalam aneka persoalan dan pembangunan bangsa. Sementara itu, Kardinal Suharyo dalam "The Catholic Way", setelah membahas aneka persoalan dari kerusakan lingkungan sampai *cocktail psychology*, kemudian mengambil inspirasi dari teologi Kitab Wahyu yang memimpikan komunitas Kristiani, meskipun minoritas, dapat berperan sebagai "komunitas-komunitas pengharapan".

Tulisan dua kardinal kita ini semestinya sebagai pancingan bagi kita semua untuk melanjutkan pencarian bagaimana Kristianitas di Indonesia ini mesti memosisikan diri. Pengalaman sebagai minoritas bisa menjebak komunitas Kristiani dalam *ghetto* sehingga cenderung mencari yang aman dan menjauhi konflik. Padahal, kalau kita ingin terlibat dalam karut-marutnya permasalahan hidup berbangsa ini, satu-satunya jalan Kekatolikan (*the Catholic way*) adalah melibatkan diri dalam usaha bersama membangun harapan baru bagi semua, terutama yang lemah dan tersingkir.

Di sinilah, teologi publik sebagai sebuah metode berteologi bisa menawarkan sumbangannya yang khas. ♦